

Lampiran 1

**Rencana Strategis
2010-2014**

Indikator Kinerja Tahunan

Kementerian Kehutanan

INDIKATOR KINERJA TAHUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Kementerian Kehutanan									5.882,59	5.964,19	6.000,91	6.327,34	6.358,87
1.	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan.	§ Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP dan usaha pemanfaatan (IUPHHK- HA/HT/HHBK/RE/Jasling) § Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat (sebesar 5 % terdiri dari hasil hutan kayu/HHBK/Jasling) § Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intesitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (luas tanaman bertambah 2,65 juta Ha) § Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan (PNBP meningkat 10%) § Ekspor hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu)						298,83	309,70	316,80	328,41	334,19
a.	Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman	Peningkatan produksi hutan tanaman	§ Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha § Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha. § Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman	450.000 ha 450.000 ha 5 unit	1000.000 ha 1000.000 ha 17 unit	1.500.000 ha 1.500.000 ha 28 unit	2.250.000 ha 2.100.000 ha 37 unit	3.000.000 ha 2.650.000 ha 50 unit	44,72	47,51	49,89	52,38	55,00
b.	Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam	§ Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 %	1%	2%	3%	4%	5%	48,69	52,66	55,29	58,06	60,96

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			§ Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 % § 50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayut § Penerbitan IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (LOA) seluas 2,5 juta ha	10%	20%	30%	40%	50%					
				10%	20%	30%	40%	50%					
				300.000 ha	650.000 ha	1.100.000 ha	1.750.000 ha	2.500.000 ha					
c.	Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi	areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi	§ Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi § Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.	20%	40%	60%	80%	100%	19,42	19,81	20,01	20,61	20,63
				20%	40%	60%	80%	100%					
d.	Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan	• PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 10% • Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK	2%	4%	6%	8%	10%	62,92	64,18	64,82	66,76	66,84
				20%	40%	60%	80%	100%					
e.	Peningkatan usaha industri primer kehutanan	Peningkatan ekspor industri hasil hutan	§ Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75% § Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% § Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun)	15%	30%	45%	60%	75%	23,52	23,99	24,23	24,96	24,99
				10%	20%	30%	40%	50%					
				2%	4%	6%	8%	10%					
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Produksi Kehutanan		§ Tersusunnya program dan anggaran pada 57 unit kerja per tahun § Data pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan terpantau secara periodik pada 57 unit kerja per tahun § Tersusunnya dan terpatuhinya ketentuan-ketentuan hukum bidang Bina Produksi Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun § Tersedianya sarana kerja untuk mendukung tugas-tugas	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	99,56	101,55	102,57	105,64	105,77
				57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja	57 unit kerja					
				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket					
				24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja	24 unit kerja					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			pada pada 24 unit kerja per tahun										
2.	Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	§ Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul § Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 80% dari pemohon § Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul § Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan § Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100% § Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 provinsi						331,25	345,55	358,84	378,08	384,65
a.	Pengukuhan Kawasan Hutan	Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	§ Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan § Keputusan penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%) § Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% § Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75% § Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan	3.400 km	8000 km	12.000 km	18.000 km	25.000 km	70,64	76,01	79,81	83,40	83,50
				20%	40%	60%	80%	100%					
				15%	30%	45%	60%	75%					
				15%	30%	45%	60%	75%					
				15%	30%	45%	60%	75%					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%										
b.	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung	§ Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi § Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia § Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi § Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul § Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKM, HTR) selesai 90%.	4 Prov 4 Prov 4 Prov 2 Judul 15%	10 Prov 10 Prov 10 Prov 3 Judul 30%	16 Prov 16 Prov 16 Prov 4 Judul 50%	22 Prov 22 Prov 22 Prov 4 Judul 70%	28 Prov 28 Prov 28 Prov 4 Judul 90%	36,10	36,82	37,56	39,25	39,30
c.	Penyusunan rencana makro kawasan hutan	Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan	§ Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul § Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia § Bahan kebijakan perencanaan ruang,, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.	1 judul 50% 2 judul	2 judul 70% 4 judul	3 judul 80% 6 judul	4 judul 90% 7 judul	4 judul 100% 8 judul	57,00	58,14	59,30	61,97	62,05
d.	Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan	Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial	§ Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul § Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul § Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul § Basis data spasial sumberdaya	1 judul 1 judul 1 judul 1 kali	2 judul 2 judul 2 judul 2 kali	3 judul 3 judul 3 judul 3 kali	4 judul 4 judul 4 judul 4 kali	5 judul 5 judul 5 judul 5 kali	64,48	69,49	74,98	81,44	87,65

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update										
e.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan	terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku	§ Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon § Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% § Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi § Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penerbitan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul	15%	30%	45%	60%	80%	10,21	10,41	10,62	11,10	11,11
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kehutanan sebanyak 1 judul dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 5 judul (1 judul per tahun). Dokumen Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebanyak 290 satuan kerja (58 satuan kerja per tahun) Data pengelolaan dan penyelenggaraan kepegawaian untuk 260 orang per tahun. Laporan barang milik negara sebanyak 40 judul (8 judul per tahun) Kebijakan di bidang planologi kehutanan sebanyak 30 judul 	1 Renstra 1 Renja	1 Renja	1 Renja	1 Renja	1 Renja	92,82	94,68	96,57	100,92	101,04
				58 Satker	58 Satker	58 Satker	58 Satker	58 Satker					
				260 Org	260 Org	260 Org	260 Org	260 Org					
				8 judul	8 judul	8 judul	8 judul	8 judul					
				6 judul	12 judul	18 judul	24 judul	30 judul					
3.	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta	§ Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya						1.354,21	1.351,04	1.345,98	1.336,34	1.327,60

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
		pengungkit martabat bangsa dalam pegaulan global	tinggi, terdapat spesies langka dan <i>flagship</i> , atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, <i>trust fund</i> , dan kolaborasi sebanyak 4 unit § Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat § Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselaikan minimal 75% § Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau sumatera, dan pulau sulawesi berkurang 20% setiap tahun § Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional										
a.	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial.	§ Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5% § Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. § Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau,	1%	2%	3%	4%	5%	267,52	272,87	278,32	281,11	281,45
				2%	4%	6%	8%	10%					
				2 Prov	4 Prov	6 Prov	9 Prov	12 Prov					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) \$ Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 4 lokasi \$ Peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi melalui pengelolaan berbasis resort di 51 TN prioritas \$ Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem gambut, 8 provinsi \$ Meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi di area HoB (TN Kayan Mentarang, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Danau Sentarum, TN Betung Kerihun, CA Muller)	0 lokasi 10 TN 0 provinsi 3 Provinsi	1 lokasi 20 TN 2 Provinsi 3 Provinsi	2 lokasi 30 TN 4 Provinsi 3 Provinsi	3 lokasi 40 TN 6 Provinsi 3 Provinsi	4 lokasi 51 TN 8 Provinsi 3 Provinsi					
b.	Penyidikan dan Perlindungan Hutan	Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	\$ Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL, illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% \$ Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun \$ Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% \$ Peningkatan kapasitas penanganan kasus kejahatan kebakaran hutan di 10 provinsi	15% 25% 4% 10 Provinsi	30% 43,7% 8% 10 Provinsi	45% 57,8% 12% 10 Provinsi	60% 68,4% 16% 10 Provinsi	75% 76,3% 20% 10 Provinsi	162,02 165,26 168,57 170,25 170,45				
c.	Pengembangan konservasi spesies dan genetik	Meningkatnya kualitas konservasi keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan satwa liar	\$ Populasi spesies terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat \$ Penangkaran dan pemanfaatan	0% 1%	1% 2%	1,5% 3%	2% 4%	3% 5%	90,01 92,56 93,21 93,54 93,58				

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% § Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun § Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 2 aktifitas § Penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mitigasi dan evakuasi satwa akibat bencana kebakaran hutan di 10 provinsi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket					
d.	Pengendalian kebakaran hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan	§ Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 § Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 § Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi)	20%	36%	48,8%	59,2%	67,2%	300,00	275,00	250,00	230,00	220,00
e.	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	§ Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. § PNBPN dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. § Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. § Pelaksanaan demonstration activity REDD di 2 kawasan konservasi (hutan gambut)	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	90,00	91,80	93,64	94,57	94,69

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			§ Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan wisata alam di sekitar kawasan konservasi pada 29 provinsi	29 Provinsi	29 Provinsi	29 Provinsi	29 Provinsi	29 Provinsi					
f.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam		<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi meningkat dari 16 UPT menjadi 77 UPT Pembentukan 6 UPT baru Ditjen PHKA di Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara Kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya dengan sumber dana bersifat hibah, non komersial, dan technical assistance dan program penghapusan hutang melalui DNS meningkat setiap tahunnya, minimal 2 dokumen per tahun Tersedianya peraturan perundangan bidang konservasi sumber daya alam hutan dan ekosistemnya yang bersifat komprehensif dalam mendukung dinamika lapangan, 3 dokumen per tahun Tersedianya dokumen program dan anggaran serta laporan evaluasi dan keuangan pada 6 satker pusat dan 77 satker UPT serta 33 Dinas Provinsi, 580 dokumen Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan <i>flagship</i>, atau mempunyai fungsi 	25 UPT	35 UPT	45 UPT	55 UPT	61 UPT	444,66	453,55	462,24	466,87	467,43
				6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT	6 UPT					
				2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen	8 dokumen	10 dokumen					
				3 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	12 dokumen	15 dokumen					
				116 dokumen	232 dokumen	348 dokumen	464 dokumen	580 dokumen					
				2 unit	5 unit	8 unit	10 unit	12 unit					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			pelindung hulu sungai, dan atau memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri membiayai seluruh atau sebagian program pengembangan konservasi dalam bentuk BLU sebanyak 12 unit, DNS, <i>trust fund</i> , dan kolaborasi sebanyak 4 unit										
4.	Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas kehutanan	§ Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha. § Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) seluas 1 juta ha. § Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha. § Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha. § Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas. § Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha.						3.098,07	3.106,43	3.115,92	3.392,48	3.418,07
a.	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	§ Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha. § Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. § Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha. § Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	160.000 Ha	320.000 Ha	480.000 Ha	640.000 Ha	800.000 Ha	1.541,49	1.541,49	1.541,49	1.796,49	1.801,49
				100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha					
				1.000 Ha	2.000 Ha	3.000 Ha	4.000 Ha	5.000 Ha					
				60.000 Ha	120.000 Ha	180.000 Ha	240.000 Ha	295.000 Ha					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
b.	Pengembangan Perhutanan Sosial	meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	\$ Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha \$ Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm \$ Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm \$ Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi \$ Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha \$ Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten \$ Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha	400.000 Ha	800.000 Ha	1.200.000 Ha	1.600.000 Ha	2.000.000 Ha	1.238,40	1.240,40	1.243,40	1.248,40	1.268,58
			100 Klpk	100 Klpk	200 Klpk	300 Klpk	400 Klpk	500 Klpk					
			10 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit					
			4 Prov	4 Prov	8 Prov	16 Prov	22 Prov	32 Prov					
			50.000 Ha	50.000 Ha	100.000 Ha	150.000 Ha	200.000 Ha	250.000 Ha					
			6 Kab	6 Kab	12 Kab	18 Kab	24 Kab	30 Kab					
			100.000 Ha	100.000 Ha	200.000 Ha	300.000 Ha	400.000 Ha	500.000 Ha					
c.	Pengembangan perbenihan tanaman hutan	ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai	\$ Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik \$ Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha \$ Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun \$ Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	4.500 Ha	20,86	21,28	21,70	22,79	22,82
			1.200 Ha	1.200 Ha	2.100 Ha	3.300 Ha	4.500 Ha	6.000 Ha					
			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket					
			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket					
d.	Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas	\$ Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas \$ Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 108 BPDAS \$ Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS	22 DAS	43 DAS	68 DAS	93 DAS	108 DAS	137,59	140,34	143,15	150,31	150,49
			7 BPDAS	7 BPDAS	43 BPDAS	68 BPDAS	93 BPDAS	108 BPDAS					
			7 BPDAS	7 BPDAS	14 BPDAS	21 BPDAS	28 BPDAS	36 BPDAS					
e.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial		\$ Peraturan perundang-undangan bidang RLPS (UU 1 buah, PP/Perpres/Permenhut 12 buah, pedoman/NSPK 70 buah) \$ Infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan kegiatan	2 Permenhut	4 Permenhut	7 Permenhut	9 Permenhut	12 Permenhut	159,73	162,92	166,18	174,49	174,70
			50 satker	50 satker	50 satker	50 satker	50 satker	50 satker					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			RLPS yang efektif dan efisien di 50 satker \$ Terselenggaranya pembinaan penguatan kelembagaan bidang RLPS, 33 Provinsi \$ Aparat Ditjen RLPS yang terlatih, pusat dan daerah di bidang RLPS, 50 Satker \$ Tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 50 satker \$ SIM RLPS, 1 unit \$ Kerjasama lembaga nasional dan internasional di 4 bidang kegiatan RLPS per tahun	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi					
				50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker					
				50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker	50 Satker					
				1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang	1 Unit 4 Bidang					
5.	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan	Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim	\$ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul \$ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul \$ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul \$ Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul						212,26	216,51	220,84	229,67	229,94
a.	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.	Ketersediaan dan pemanfaatan iptek dasar dan terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan	\$ Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul \$ Iptek dasar dan terapan yang	20%	40%	60%	80%	100%	21,70	22,13	22,58	23,48	23,51
				20%	40%	60%	80%	100%					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.										
b.	Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.	tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam	<ul style="list-style-type: none"> Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul. 	20%	40%	60%	80%	100%	23,00	23,46	23,93	24,89	24,92
c.	Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar dan terapan bidang pengolahan hasil hutan	§ Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul § Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	20%	40%	60%	80%	100%	21,00	21,42	21,85	22,72	22,75
d.	Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan	ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan terapan hutan tanaman	§ Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 judul § Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul	20%	40%	60%	80%	100%	30,27	30,88	31,49	32,75	32,79
e.	Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> Rencana program dan anggaran sebanyak 20 satuan kerja per tahun. Laporan dan Evaluasi sebanyak 20 unit kerja per tahun. Sarana dan prasarana perkantoran pada 20 unit kerja per tahun Pembinaan pegawai sebanyak 1.702 orang per tahun Tata laksana keuangan, umum, kerjasama, dan desiminasi pada 20 unit kerja per tahun. 	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	20 Satker	116,29	118,62	120,99	125,83	125,98
				20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja					
				20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja					
				1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org	1.702 Org					
				20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja	20 unit kerja					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan								546,56	592,72	599,44	617,99	619,99
a.	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan		§ Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 1 judul, serta Rencana Kerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul (1 judul per tahun) § Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebanyak 269 satuan kerja per tahun § Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Lima Tahun masing-masing 1 judul, dan Laporan Kinerja Tahunan Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan masing-masing 5 judul § Data dan informasi perencanaan Kementerian Kehutanan sebanyak 1 paket per tahun.	2 Renstra 2 Renja	2 Renja	2 Renja	2 Renja	2 Renja	24,23	26,76	27,03	28,18	28,21
				269 DIPA	269 DIPA	269 DIPA	269 DIPA	269 DIPA					
				4 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan					
				1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket					
b.	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian		§ Pelayanan administrasi kepegawaian secara akurat dan tepat waktu sebanyak 50.000 dokumen § Pengembangan kapasitas SDM/pegawai sebanyak 17.697 orang § Pengembangan instrumen pengelolaan kepegawaian sebanyak 10 jenis	10.000 dok	20.000 dok	30.000 dok	40.000 dok	50.000 dok	16,15	18,90	19,09	19,66	19,69
				17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg	17.697 peg					
				2 jenis	4 jenis	6 jenis	8 jenis	10 jenis					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			§ Penguatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis internet, 1 paket per tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket					
c.	Penyelenggaraan dan Pembinaan Tata Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan		§ Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah bidang kehutanan sebanyak 22 dokumens. § Laporan evaluasi dan penelaahan hukum bidang pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, konservasi sumberdaya alam, penggunaan kawasan hutan, sebanyak 4 paket per tahun § Bantuan hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pidana sebanyak 3 paket per tahun § Pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi pusat, unit pelaksana teknis, dan pembinaan desentralisasi, perbaikan pelayanan publik dan kebijakan publik serta pengawasan melekat, sebanyak 6 paket per tahun	4 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	8 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	12 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	18 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	22 jenis 4 paket 3 paket 6 paket	9,80	11,20	11,31	11,65	11,67
d.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan		§ Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 71 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80% § Laporan keuangan Kementerian Kehutanan dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai laporan tahun 2011, sebanyak 5 judul (1 judul setiap tahun) § Laporan keuangan dan perbendaharaan sebanyak 33 propinsi	15% 1 judul 33 Prov	30% 1 judul 33 Prov	45% 1 judul 33 Prov	60% 1 judul 33 Prov	80% 1 judul 33 Prov	51,94	54,85	55,40	57,06	57,13
e.	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan.		§ Laporan SIMAK BMN Kementerian Kehutanan secara akuntabel dan tepat waktu sebanyak 221 satuan kerja per tahun § Serifikasi ahli pengadaan	221 Satker 200 Org	221 Satker 400 Org	221 Satker 600 Org	221 Satker 800 Org	221 Satker 1.000 Org	157,98	176,40	178,16	183,51	183,73

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			barang dan jasa bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia/pejabat pengadaan di Kementerian Kehutanan sebanyak 1.000 orang § Sertifikasi tanah milik Kementerian Kehutanan di 5 lokasi (Mangala Wanabakti, Kanci, Cimanggis, Kramatjati, dan Rumpin) § Status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi terselesaikan. § Administrasi persuratan Kementerian Kehutanan 2 kegiatan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan (SIK), dan Pedoman Tata Naskah Dinas.	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi					
				5 Prov	10 Prov	15 Prov	15 Prov	15 Prov					
				1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg					
f.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen Kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)	§ Penyelenggaraan SMK kehutanan 1.440 siswa § Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta § Karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa § Sertifikasi ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit	285 siswa 3000 orang 65 siswa 0 unit	570 siswa 6000 orang 130 siswa 1 unit	855 siswa 9000 orang 195 siswa 3 unit	1140 siswa 12000 orang 260 siswa 4 unit	1440 siswa 15000 orang 325 siswa 5 unit	143,70	150,90	152,41	156,98	157,17
g.	Penyuluhan kehutanan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	§ Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri § Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan § Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi § Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket	100 Klpk 900 Org 33 Prov 1 Paket	200 Klpk 1.800 Org 33 Prov 2 Paket	300 Klpk 2.700 Org 33 Prov 3 Paket	400 Klpk 3.600 Org 33 Prov 4 Paket	500 Klpk 4.500 Org 33 Prov 5 Paket	76,74	80,76	81,57	84,01	84,12
h.	Pembinaan Standarisasi dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Kehutanan		§ Rancangan Standard Nasional Indonesia (SNI) bidang kehutanan sebanyak 30 produk § SNI yang siap diselaraskan dengan standar internasional sebanyak 20 judul § Satuan pengelola hutan milik	6 produk 4 judul 8 unit	12 produk 8 judul 16 unit	18 produk 12 judul 24 unit	24 produk 16 judul 32 unit	30 produk 20 judul 40 unit	7,54	7,69	7,77	8,00	8,01

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			swasta dan milik rakyat terdampingi untuk melaksanakan pengelolaan hutan lestari dan mendapatkan sertifikat nasional maupun internasional sebanyak 40 unit § Satuan kerja lingkup Kementerian kehutanan terdampingi untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standard internasional sebanyak 20 unit § Rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan kehutanan sebanyak 15 paket	4 unit 3 paket	8 unit 6 paket	12 unit 9 paket	16 unit 12 paket	20 unit 15 paket					
i.	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri		§ Partisipasi Indonesia dalam forum kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) di bidang kehutanan sebanyak 3 paket per tahun § Komitmen kerjasama internasional di bidang kehutanan (bilateral, multilateral, regional, dan multipihak) sebanyak 5 paket § Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga § Laporan monitoring dan evaluasi kerjasama internasional (bilateral, multilateral dan regional) sebanyak 3 paket per tahun	3 paket 1 paket 1 negara 1 lembaga 3 paket	3 paket 2 paket 2 negara 2 lembaga 3 paket	3 paket 3 paket 3 negara 3 lembaga 3 paket	3 paket 4 paket 4 negara 3 lembaga 3 paket	3 paket 5 paket 5 negara 3 lembaga 3 paket	16,43	18,76	18,95	19,52	19,54
j.	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan		§ Liputan kegiatan Menteri Kehutanan dan Pejabat Kemenhut, pemberitaan issue-issue strategis dan jumpa pers Menteri kehutanan dan Pejabat Kemenhut dengan media masa sejumlah 100 kali § Pameran pembangunan kehutanan sejumlah 65 kali § Pertemuan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kehutanan sejumlah 75 kali § Menyiapkan bahan rapat	20 kali 13 kali 15 kali 10 kali	40 kali 26 kali 30 kali 20 kali	60 kali 39 kali 45 kali 30 kali	80 kali 52 kali 60 kali 40 kali	100 kali 65 kali 75 kali 50 kali	12,04	14,30	14,44	14,88	14,89

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
			Menteri Kehutanan pada acara rapat kerja dengan DPR RI dan DPD RI sejumlah 50 kali \$ Pelayanan data dan informasi pembangunan kehutanan, 1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket					
k.	Pengelolaan Keuangan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Kehutanan		\$ Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman (hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat) seluas 324.625 ha \$ Rencana Bisnis dan anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) sebanyak 5 judul \$ Penilaian kelayakan permohonan pinjaman sebanyak 570 proposal	64.925 ha 1 judul 114 proposal	129.850 ha 2 judul 228 proposal	194.775 ha 3 judul 342 proposal	259.700 ha 4 judul 456 proposal	324.625 ha 5 judul 570 proposal	9,85	10,80	10,91	11,24	11,25
l.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I		\$ Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul \$ Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 1 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional I sebanyak 5 judul	1 judul 1 judul 1 judul 1 judul	1 judul 2 judul 1 judul 1 judul	1 judul 3 judul 1 judul 3 judul	1 judul 4 judul 1 judul 4 judul	1 judul 5 judul 1 judul 5 judul	4,41	4,50	4,54	4,68	4,69
m.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional II		\$ Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul \$ Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 1 judul \$ Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional II sebanyak 5 judul	1 judul 1 judul 1 judul 1 judul	1 judul 2 judul 1 judul 2 judul	1 judul 3 judul 1 judul 3 judul	1 judul 4 judul 1 judul 4 judul	1 judul 5 judul 1 judul 5 judul	4,51	4,60	4,65	4,79	4,79

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
n.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III		<ul style="list-style-type: none"> § Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul § Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul § Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 1 judul § Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional III sebanyak 5 judul. 	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	4,34	4,43	4,47	4,61	4,61
				1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	5 judul					
				1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul					
				1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	5 judul					
o.	Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV		<ul style="list-style-type: none"> § Rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul § Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul § Laporan monitoring dan evaluasi Renstra Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 1 judul § Laporan monitoring dan evaluasi Renja Pembangunan Kehutanan Regional IV sebanyak 5 judul. 	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	6,90	7,87	8,75	9,23	10,50
				1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	5 judul					
				1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul					
				1 judul	2 judul	3 judul	4 judul	5 judul					
7.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> § Terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan 						41,41	42,24	43,08	44,38	44,43
a.	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat I		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan • Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 65 laporan • Renja Inspektorat I sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 13 laporan	120 laporan 26 laporan	180 laporan 39 laporan	240 laporan 52 laporan	300 laporan 65 laporan	3,03	3,09	3,15	3,25	3,25
				1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	2 Renja 2 PKPT 2 lap.tahunan	3 Renja 3 PKPT 3 lap.tahunan	4 Renja 4 PKPT 4 lap.tahunan	5 Renja 5 PKPT 5 lap.tahunan					

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
b	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat II		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 50 laporan Renja Inspektorat II sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 10 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	120 laporan 20 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	180 laporan 30 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	240 laporan 40 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	300 laporan 50 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	3,22	3,28	3,35	3,45	3,45
c	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat III		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 35 laporan Renja Inspektorat III sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 7 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	120 laporan 14 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	180 laporan 21 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	240 laporan 28 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	300 laporan 35 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	3,57	3,64	3,71	3,83	3,83
d	Pengawasan Terhadap Kinerja, Keuangan dan Administrasi pada Wilayah Kerja Inspektorat IV		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit reguler sebanyak 300 laporan Laporan hasil review laporan keuangan sebanyak 45 laporan Renja Inspektorat IV sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	60 laporan 9 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	120 laporan 18 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	180 laporan 27 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	240 laporan 36 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	300 laporan 45 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	3,48	3,55	3,62	3,73	3,73
e	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN		<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil audit khusus sebanyak 125 laporan Laporan hasil identifikasi khusus serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) masing-masing sebanyak 125 laporan Renja Inspektorat khusus sebanyak 5 judul, usulan PKPT sebanyak 5 judul, laporan tahunan sebanyak 5 judul 	25 laporan 25 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	50 laporan 50 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	75 laporan 75 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	100 laporan 100 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	125 laporan 125 laporan 1 Renja 1 PKPT 1 lap.tahunan	4,00	4,08	4,16	4,29	4,29

No.	PROGRAM /KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)	INDIKATOR	TARGET KUMULATIF					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
f	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan		<ul style="list-style-type: none"> Renstra Inspektorat Jenderal Kemenhut 1 judul, Renja Inspektorat Jenderal Kemenhut 5 judul, dokumen RKAKL/DIPA 5 judul, dokumen PKPT 5 judul dan data informasi pengawasan 5 judul Laporan lingkup Iljen Kemenhut 120 laporan (Lakip, APIP, Tahunan, Bulanan, Triwulan, semesteran, Kepegawaian dan laporan BMN) Laporan pencermatan kegiatan Kemenhut 200 laporan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit 300 laporan dan laporan pemuatkhiran data 25 laporan Peraturan bidang pengawasan 30 dokumen dan bulletin pengawasan 20 edisi Pembinaan pegawai sebanyak 1.300 orang dan diklat pengembangan SDM sebanyak 700 orang 	1 Renstra 1 Renja 1 PKPT 24 Laporan 105 laporan 6 peraturan 4 bulletin Diklat 140 orang	2 Renja 2 PKPT 48 Laporan 210 laporan 12 per aturan 8 bulletin Diklat 280 orang	3 Renja 3 PKPT 72 Laporan 315 laporan 18 per aturan 12 bulletin Diklat 420 orang	4 Renja 4 PKPT 96 Laporan 420 laporan 24 per aturan 16 bulletin Diklat 560 orang	5 Renja 5 PKPT 120 Laporan 525 laporan 30 per aturan 20 bulletin Diklat 700 orang	24,11	24,59	25,08	25,84	25,87